

# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

(Audited)



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu pelaksanaannya adalah dengan Menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Diklat Hukum Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Semarang, 2 Juni 2025

Kepala,

Rinto Gunawan Sitorus, SH., MH.

NIP 198208292008011001

---

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I.    Laporan Realisasi Anggaran	3
II.   Neraca	4
III.  Laporan Operasional	5
IV.  Laporan Perubahan Ekuitas	6
V.    Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A.  Penjelasan Umum	7
B.  Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C.  Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	24
D.  Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	32
E.  Penjelasan Atas Pos-Pos Perubahan Ekuitas	35
F.  Pengungkapan Penting Lainnya	38
VI.  Lampiran	41

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 2 Juni 2025

Kepala,



Rinto Gunawan Sitorus, SH., MH.

NIP 198208292008011001

Laporan Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Tahun 2024 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

#### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 39.420.788,-. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 13.192.690.212,- atau mencapai 98,7% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.366.666.000,-.

#### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 370.856.664.144,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 10.334.380,- ; Aset Tetap (netto) sebesar Rp. 370.823.986.014,- ; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp. 22.343.750,-. Nilai Kewajiban sebesar Rp. 0,- dan Ekuitas sebesar Rp. 370.856.664.144,-.

#### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 14.771,190.388,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 14.737.348.046,-. Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Rp. 0,- Surplus Kegiatan Non Operasional lainnya Rp. 33.842.342,- sehingga surplus/defisit dari

---

kegiatan non operasional sebesar Rp. 109.322.342,-. Pada Semester II Tahun 2024 entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 14.629.939.698,-.

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 372.416.979.638,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 14.737.348.046,- kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 8.165.220,-. dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 13.153.269.424,- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 370.824.763.688,-.

#### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Th 2024				Th 2023 Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1	-	-	-		-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	-	39.420.788	39.420.788		44.300.475
<b>Jumlah Pendapatan dan Hibah</b>		<b>-</b>	<b>39.420.788</b>	<b>39.420.788</b>		<b>44.300.475</b>
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	13.366.666.000	13.192.690	(13.353.473.310)	98,	1.430.988.361
Belanja Barang	B.4	10.988.551.000	1.538.635.576	(9.449.915.424)	98,41	6.759.376.870
Belanja Modal	B.5	814.601.000	809.072.000	(5.529.000)	98,	5.801.629.795
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>25.169.818.000</b>	<b>2.360.900.266</b>	<b>(22.808.917.734)</b>	<b>9,38</b>	<b>13.991.995.026</b>

## II. NERACA

### BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH NERACA

PER 31 Desember 2024 Dan 30 Desember 2023

(DalamRupiah)

Uraian	Cat.	2024	2023
<b>Aset</b>			
<b>Aset Lancar</b>	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	5.578.446
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	(27.892)
Persediaan	C.1.3	10.334.380	9.614.355
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>10.334.380</b>	<b>15.164.909</b>
<b>Aset Tetap</b>	C.2		
Tanah	C.2.1	323.737.178.000	323.737.178.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	8.042.520.811	7.580.845.811
Gedung dan Bangunan	C.2.3	48.900.340.295	48.552.943.295
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	7.983.150	7.983.150
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5	-	-
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(9.864.036.242)	(7.494.267.362)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>370.823.986.014</b>	<b>372.384.682.894</b>
<b>Aset Lainnya</b>	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	140.750.000	140.750.000
Aset Lain-lain	C.3.2	39.105.126	39.105.126
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(157.511.376)	(137.032.876)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>22.343.750</b>	<b>42.822.250</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>370.856.664.144</b>	<b>372.442.670.053</b>
<b>Kewajiban</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	-	25.690.415
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.4.3	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>-</b>	<b>25.690.415</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>-</b>	<b>25.690.415</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas	C.5	370.856.664.144	372.416.979.638
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>370.856.664.144</b>	<b>372.416.979.638</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>370.856.664.144</b>	<b>372.442.670.053</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	2024	2023
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan Negara Bukan Pajak</b>	D.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>		-	-
<b>Beban Operasional</b>	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	1.538.635.576	1.430.988.361
Beban Persediaan	D.2.2	78.122.185	63.068.805
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	6.289.535.387	3.988.366.673
Beban Pemeliharaan	D.2.4	803.514.305	477.533.973
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	3.647.400.319	2.237.219.048
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	2.382.082.160	2.392.745.389
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	D.2.7	(27.892)	27.892
<b>Jumlah Beban</b>		<b>14.739.262.040</b>	<b>10.589.950.141</b>
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional</b>		<b>14.739.262.040</b>	<b>10.589.950.141</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>	D.3		
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lain		109.322.342	-
<b>Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>109.322.342</b>	<b>-</b>
<b>Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>14.629.939.698</b>	<b>10.589.950.141</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>			
Beban Luar Biasa		-	-
<b>Pos Luar Biasa</b>		-	-
<b>Surplus/Defisit - LO</b>		<b>14.629.939.698</b>	<b>10.589.950.141</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	2024	2023
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>E.1</b>	<b>372.416.979.638</b>	<b>368.978.247.825</b>
Surplus/Defisit - LO	E.2	(14.629.939.698)	(10.589.950.141)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas			
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		(83.645.220)	868.653
Transaksi Antar Entitas	E.5	13.153.269.424	14.027.813.301
<b>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</b>	<b>E.6</b>	<b>(1.560.315.494)</b>	<b>3.438.731.813</b>
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>370.856.664.144</b>	<b>372.416.979.638</b>

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Rencana Strategis

*Profil dan Rencana Strategis* Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sebagai satuan kerja dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum. Adapun wilayah kerjanya mencakup di 11 Provinsi, yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum hadir untuk menjembatani dan memfasilitasi kebutuhan Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan Pendidikan serta pelatihan di bidang Hukum, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum.

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Menyusun rencana, program dan anggaran pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum;
2. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum;
3. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum;
4. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai pendidikan dan Pelatihan Hukum; dan

5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan* Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun 2024 ini merupakan laporan Semester II yang dikelola oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) modul GLP, Aset Tetap dan persediaan. SAKTI modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SAKTI modul aset tetap dan persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Tahun 2024 (Audited) ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh aset dan persediaan yang dikelola Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dibawah Unit Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

### A.3. Basis Akuntansi

*Basis Akuntansi* Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### A.4. Dasar Pengukuran

*Dasar Pengukuran* Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing

dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.5. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan Akuntansi* Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

##### *Pendapatan-LRA*

#### (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### *Pendapatan-LO*

#### (2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Aset*

#### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### *Aset Lancar*

##### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah

dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</li> <li>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</li> </ol>	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### *b. Aset Tetap*

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016, sebagai berikut:
- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Kebijakan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:
  - 1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/ Daerah.
  - 2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilaiwajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap: a. Tanah, b. Gedung dan bangunan, dan c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: 1) Jalan dan Jembatan 2) Bangunan Air Pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2024. Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga). Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S761/MK.06/2020 tanggal 14 September 2020 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencanangan pada tanggal 29

Agustus 2017. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### *Penyusutan Aset Tetap*

#### *c. Penyusutan Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

## *Aset Lainnya*

### *e. Aset Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2020 tentang perubahan atas KMK Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**B.1. Pendapatan**

*Realisasi* Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada  
*Pendapatan Rp.* 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 39.420.788,-  
*39.420.788,-*

## B.2. Belanja

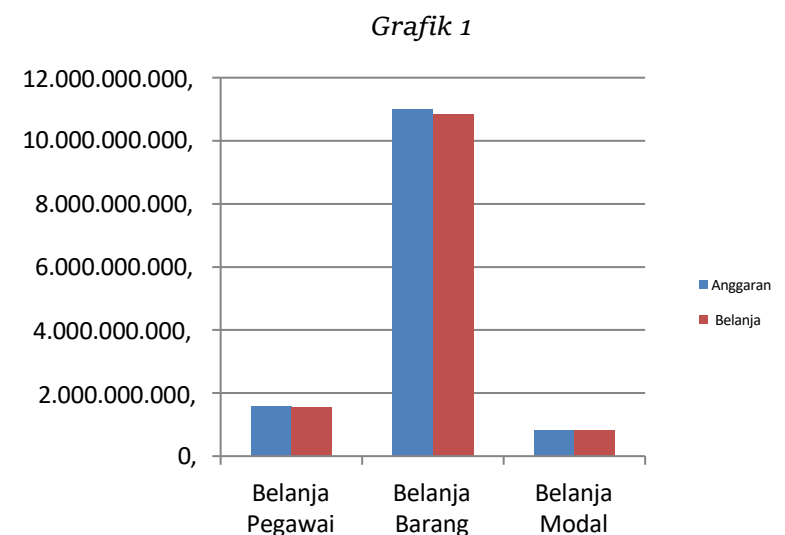
*Realisasi Belanja Rp. 13.192.690.212,-*

Realisasi Belanja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 13.192.690.212,- atau 98,7% dari anggaran belanja sebesar Rp. 13.366.666.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 1*  
*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024*

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1.563.514.000	1.538.635.576	98,41
Belanja Barang	10.988.551.000	10.844.982.636	98,69
Belanja Modal	814.601.000	809.072.000	99,32
<b>Jumlah</b>	<b>13.366.666.000</b>	<b>13.192.690.212</b>	<b>98,70</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Perbandingan realisasi anggaran dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

*Tabel 2*  
*Perbandingan Realisasi Belanja 2024 dan 2023*

<b>URAIAN</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>%</b>
Belanja Pegawai	1.538.635.576	1.430.988.361	7,52
Belanja Barang	10.844.982.636	6.759.376.870	60,44
Belanja Modal	809.072.000	5.801.629.795	(86,05)
<b>Jumlah</b>	<b>13.192.690.212</b>	<b>13.991.995.026</b>	<b>(5,71)</b>

Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 7.52% dengan adanya peningkatan jumlah pegawai sementara program reentry yang telah menyelesaikan tugas belajar. Realisasi belanja barang juga mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 60.44% dikarenakan seluruh kegiatan dapat terlaksana tanpa ada kendala signifikan seperti pandemi atau keadaan luar biasa lainnya yang menghambat dalam pelaksanaan tugas fungsi. Untuk belanja modal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dikarenakan alokasi belanja modal pada tahun 2024 mengalami penurunan.

### B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai*  
*Rp.*  
*1.538.635.576,-*

Realisasi Belanja Pegawai 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.538.635.576,- dan Rp. 1.430.988.361,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Realisasi belanja pegawai

31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 7,52% persen dari TA 2023. Adapun Rincian Belanja Pegawai dapat disajikan sebagai berikut:

*Tabel 3*  
*Realisasi Belanja Pegawai 2024*

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji Pokok	1.066.396.000	1.066.394.600	100,00
Belanja Pembulatan Gaji Pokok	20.000	17.506	87,53
Belanja Tunjangan Suami/Istri	62.102.000	62.100.680	100,00
Belanja Tunjangan Anak	23.026.000	23.024.472	99,99
Belanja Tunjangan Struktural	36.540.000	36.540.000	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional	38.912.000	38.912.000	100,00
Belanja Tunjangan PPH	7.150.000	6.931.104	96,94
Belanja Tunj. Beras	58.516.000	58.515.360	100,00
Belanja Uang Makan	196.920.000	173.066.000	87,89
Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/POLRI	35.630.000	35.630.000	100,00
Belanja Uang Lembur	38.302.000	37.504.000	97,92
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.563.514.000</b>	<b>1.538.635.722</b>	<b>98,41</b>

#### B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang* Realisasi Belanja Barang 2024 dan 2023 Adalah Masing-Masing  
*Rp.* Sebesar Rp. 10.844.982.636,- dan Rp. 6.759.376.870,-.  
*10.844.982.636,-* Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 Mengalami kenaikan sebesar 60,44% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Rincian Realisasi Belanja Barang disajikan didalam tabel sebagai berikut:

*Tabel 4*  
*Realisasi Belanja Barang 2024*

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	1.087.607.000	1.007.061.108	92,59
Belanja Barang Non Operasional	2.187.403.000	2.178.390.594	99,59
Belanja Barang Persediaan	276.051.000	266.648.804	96,59
Belanja Jasa	2.962.512.000	2.944.295.142	99,39
Belanja Pemeliharaan	807.969.000	801.186.669	99,16
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.667.009.000	3.647.400.319	99,47
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>10.988.551.000</b>	<b>10.844.982.636</b>	<b>98,69</b>

## B.5 Belanja Modal

**Belanja Modal Rp. 809.072.000,-** Realisasi Belanja Modal 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 809.072.000,- dan Rp. 5.801.629.795,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Tabel 6*  
*Realisasi Belanja Modal 2024*

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	466.845.000	461.675.000	98,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	347.756.000	347.397.000	99,90
Belanja Modal Lainnya	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>814.601.000</b>	<b>809.072.000</b>	<b>99,32</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. Aset Lancar

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

**Kas Di bendahara Pengeluaran Rp. 0,-** Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,-. Kas di Bendahara Pengeluaran ini merupakan Uang Persediaan di Balai Diklat Hukum Jawa Tengah.

#### C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

**Kas Lainnya dan Setara Kas Rp. 0,-** Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,-. Tidak ada Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

#### C.1.3 Persediaan

**Persediaan Rp. 10.334.380,-** Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.334380,- dan Rp.

9.614.355,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

## C.2 Aset Tetap

### C.2.1 Tanah

#### Tanah

#### Rp.

323.737.178.000,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 323.737.178.000,- dan Rp. 323.737.178.000,-

Tabel 8  
Mutasi Tanah 2024

URAIAN	Realisasi
Nilai Tanah 01 Januari 2024	323.737.178.000
<b>Mutasi tambah :</b>	
Mutasi Tambah	0
<b>Mutasi kurang :</b>	
Mutasi Kurang	0
<b>Nilai Tanah per 30 Juni 2024</b>	<b>323.737.178.000</b>

Tidak ada Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tanah sehingga nilai per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 323.737.178.000,-

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

#### Peralatan dan

#### Mesin

Rp. 8.042.520.811,-

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per Desember 2024 dan Desember 2023 adalah Rp. 8.042.520.811,- dan Rp. 7,580,845,811,-. Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 8.042.520.811,- dengan rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

**(1) Alat Bantu**

Saldo Alat Bantu (3.01) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 569.245.000,-

**(2) Alat Angkutan Darat Bermotor**

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 641.150.000,-

**(3) Alat Bengkel Tak Bermesin**

Saldo Alat Bengkel Tak Bermesin (3.02.02) pada laporan barang pengguna satker Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 6.980.000,-

**(4) Alat Pengolahan**

Saldo alat pengolahan (3.04) pada per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.232.000,-

**(5) Alat kantor dan Alat Rumah Tangga**

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) pada Laporan Barang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 4.788.707.001,-

**(6) Alat Studio dan Komunikasi**

Saldo Alat Studio dan Komunikasi (3.06) pada Laporan Barang Kuasa Penggun per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 232.633.250,-

**(7) Alat kedokteran**

Saldo Alat Kedokteran (3.07) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 17.200.000,-

**(8) Komputer**

Saldo Alat Komputer (3.10) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.583.562.360,-

**(9) Peralatan Olahraga**

Saldo Peralatan Olahraga (3.19) per 31 Desember 2024

adalah sebesar Rp. 201.841.200,-

**(10) Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin.**

Total Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 6.111.322.822,-.

*Tabel 9  
Mutasi Peralatan dan Mesin 2024*

<b>URAIAN</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Nilai Peralatan dan Mesin per 01 Jan 2024</b>	7.580.845.811
<b>Mutasi tambah :</b>	461.675.000
Pembelian	386.195.000
Perolehan lainnya	75.480.000
<b>Mutasi kurang :</b>	0
Reklase Keluar Lemari Penyimpan	0
<b>Saldo per 31 Des 2024</b>	<b>8.042.520.811</b>
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.111.322.822)
<b>Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024</b>	<b>1.931.197.989</b>

Mutasi Tambah pembelian di Peralatan dan Mesin berupa pembelian peralatan dan mesin berupa, pc unit, laptop, printer, tempat tidur besi, lcd proyektor, mesin pemotong rumput, videc conference, papan visual, sound system, kursi pimpinn, tablet, sofa single seater sebesar Rp.386.195.000 dan peralatan lainnya berupa pintu elektrik dan backdrop sebesar Rp. 75.480.000,- dan reklase masuk nakas dari lemari penyimpanan sebesar Rp. 0,- serta Mutasi Keluar berupa Reklase Keluar Lemari Penyimpan menjadi Nakas sebesar Rp. 0,- sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp 8.042.520.811,-. Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp. 6.111.322.822,- sehingga nilai buku per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.931.197.989,-.

### C.2.3 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan Rp. 48.900.340.295,-*

Nilai Gedung dan Bangunan sebelum penyusutan per Desember 2024 dan Desember 2023 adalah Rp. 48,900,340,295,- dan Rp. 48.552,943,295,-.

Tabel 10  
Mutasi Gedung dan Bangunan 2024

URAIAN	Realisasi
<b>Nilai Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2024</b>	48.552.943.295
<b>Mutasi tambah :</b>	539.523.000
Penataan Ruang Rapat dan Ruang Kepala	306.231.000
Pemasangan Pagar Duri	233.292.000
<b>Mutasi kurang :</b>	192.126.000
Pagar permanen	116.646.000
Bangunan Gedung Kantor Permanen	75.480.000
<b>koreksi pencatatan :</b>	0
<b>Saldo Per 31 Desember 2024</b>	48.900.340.295
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.752.713.420)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>45.147.626.875</b>

Rincian mutasi tambah Gedung dan Bangunan terdiri dari Penataan Ruang Rapat dan Ruang Kepala senilai Rp. 306.231.000,- serta Pemasangan pagar duri senilai Rp. 233.292.000,-. Sedangkan mutase kurang adalah Pagar Permanen senilai Rp. 116.646.000,- serta Bangunan Gedung Kantor Pemanen senilai Rp. 75.480.000,-.

#### C.2.4. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya Rp. 7.983.150,-*

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah Rp. 7.983.150,- dan Rp. 7,983,150,-. Aset Tetap Lainnya terdiri monografi berupa Buku untuk Perpustakaan Pojok Pintar di Balai Diklat Hukum Jawa Tengah.

#### C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. 9.864.036.242*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing Rp. 9.864.036.242,- dan Rp. 7.494.267.362,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset

tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

*Tabel 11  
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2024*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	kumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	323.737.178.000	-	323.737.178.000
Peralatan dan Mesin	8.042.520.811	6.111.322.822	1.931.197.989
Gedung dan Bangunan	48.900.340.295	3.752.713.420	45.147.626.875
Aset Tetap Lainnya	7.983.150	-	7.983.150
<b>Jumlah</b>	<b>380.688.022.256</b>	<b>9.864.036.242</b>	<b>370.823.986.014</b>

### C.3 Aset lainnya

#### C.3.1. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud* Saldo aset Tak Berwujud berupa Software per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah Rp. 140.750.000,- dan Rp. 140.750.000,-.

*Tabel 12  
Mutasi Aset Tak Berwujud 2024*

URAIAN	Saldo
<b>Nilai Aset Tak Berwujud 1 Januari 2024</b>	140.750.000
<b>Mutasi tambah :</b>	
Software Komputer	
Aset Tak Berwujud Lainnya	0
<b>Mutasi kurang :</b>	
Aset Tak Berwujud Lainnya	0
<b>Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Des 2024</b>	<b>140.750.000</b>

Aset Tak Berwujud terdiri atas :

1. Pembelian Software Aplikasi BLC (Badiklat Learning Center) sebesar Rp 140,750,000,-

#### C.3.2 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

*Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Rp. 39.105.126,-*

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan berupa Aset Tetap yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah Rp. 39,105,126,- dan Rp. 39.105.126,-.

*Tabel 13  
Mutasi Aset Tetap yang tidak digunakan  
Dalam operasi pemerintahan 2024*

URAIAN	Saldo
<b>Nilai Aset Per 1 Januari 2024</b>	39.105.126
<b>Mutasi tambah :</b>	
Alat Rumah Tangga	0
Alat Kedokteran	0
Komputer	0
<b>Mutasi kurang :</b>	
Mutasi Kurang	0
<b>Nilai Aset per 31 Desember 2024</b>	<b>39.105.126</b>

### C.3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp. 157.511.376,-*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing Rp. 157.511.376,-. Dan Rp. 137.032.876,-. Akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-lain.

*Tabel 14  
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 2024*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	kumulasi Penyusuta	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	140.750.000		140.750.000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	39.105.126		39.105.126
Akumulasi Penyusutan	(Rp157.511.376)	-	157.511.376
<b>Jumlah</b>	<b>22.343.750</b>	<b>0</b>	<b>22.343.750</b>

#### C.4. Kewajiban Jangka Pendek

##### C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada Pihak Ketiga Rp. 0,-* Nilai Utang kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 25,690,415,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

##### C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan

*Utang Yang Belum Ditagihkan Rp. 0,-* Nilai Utang yang Belum Ditagihkan 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 25,690,415,-. Kewajiban yang belum ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

##### C.4.3. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari KPPN Rp. 0,-* Uang Muka dari KPPN 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

#### C.5. Ekuitas

*Ekuitas Rp. 370.856.664.144,-* Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 370.856.664.144,- dan Rp 372,416,979,638,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.2. Beban Operasional

#### D.2.1. Beban Pegawai

**Beban Pegawai Rp. 1.538.635.576,-** Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.538.635.576,- dan Rp. 1.430.988.361,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS).

#### D.2.2. Beban Persediaan

**Beban Persediaan Rp. 78.122.185,-** Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 78.122.185,- Dan Rp. 63.068.805,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

#### D.2.3. Beban Barang dan Jasa

**Beban Barang dan Jasa Rp. 6.289.535.387,-** Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.289.535.387,- dan Rp. 3.988.366.673,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

#### D.2.4. Beban Pemeliharaan

**Beban Pemeliharaan Rp. 803.514.305,-** Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 803.514.305,- dan Rp. 477.533.973,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

#### D.2.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas Rp. 3.647.400.319,-* Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.647.400.319,- dan Rp. 2.237.219.048,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

#### D.2.6. Beban Barang Untuk Diserahkan Masyarakat

*Beban barang Untuk Diserahkan Masyarakat Rp. 0,-* Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

#### D.2.7. Beban Bantuan Sosial

*Beban bantuan sosial Rp. 0,-* Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

#### D.2.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 2.382.082.160,-* Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.382.082.160,- dan Rp. 2.392.745.389,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

#### D.2.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

**Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp. 27.892,-)** Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp. 27,892,-) dan Rp. 27.892,-.

#### D.3. Kegiatan Non Operasional

**Surplus / defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. 109.322.342,-** Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp. 109.322.342,- adalah sebagai berikut:

Tabel 15  
Rincian Kegiatan Non Operasional  
31 Desember 2024

URAIAN	2024
Suplus/Defisit Pelepasan Aset penyelesaian Kewajiban Jangka panjang	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	109.322.342
Beban dari Kegiatan Non Operasional	0
<b>Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional</b>	<b>109.322.342</b>

#### D.4. Belanja Sewa

**Belanja Sewa Rp. 320.463.902,-** Realisasi Belanja Sewa sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 320.463.902,-. Adapun Rincian Belanja Sewa dapat disajikan sebagai berikut:

*Tabel 9*  
*Rincian Belanja Sewa 2024*

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
Sewa Kendaraan Operasional	133.000.000	132.992.302	99,99
Sewa Pengharum Ruangan	20.000.000	20.000.000	100,00
Sewa Kendaraan Insidentil	108.810.000	107.900.000	99,16
Sewa Perlengkapan	20.000.000	20.000.000	100,00
Sewa Tenda	39.600.000	39.571.600	99,93
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>321.410.000</b>	<b>320.463.902</b>	<b>99,71</b>

#### D.5. Belanja Jasa Lainnya

*Belanja Jasa Lainnya Rp. 79.190.640,-* Realisasi Belanja Jasa Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 79.190.640,-. Adapun Rincian Belanja Jasa Lainnya dapat disajikan sebagai berikut:

*Tabel 10*  
*Rincian Belanja Jasa Lainnya 2024*

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
Instruktur Senam	6.360.000	6.300.000	99,06
Jasa Laundry	29.700.000	29.690.640	99,97
Cek Kesehatan Pegawai	43.200.000	43.200.000	100,00
Pemasangan Telp	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>79.260.000</b>	<b>79.190.640</b>	<b>99,91</b>

### E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal Rp. 372.416.979.638,-* Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 372.416.979.638,-

#### E.2 Surplus (Defisit) LO

*Defisit LO (Rp. 14.629.939.698,-)* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah sebesar (Rp. 14.629.939.698,-) dan (Rp. 10.589.950.141,-) Defisit LO

merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp. 0,-.* Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023.

### E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Aset Tetap

#### E.4.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

*Koreksi Atas Reklasifikasi Rp. 0,-.* Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah Rp. 0,-. Koreksi atas reklasifikasi merupakan koreksi atas perubahan atas penggunaan aset tetap yang menyebabkan berubahnya nilai penyusutan aset tersebut dan selanjutnya menyebabkan perubahan nilai aset tersebut.

#### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0,-.* Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pada tahun 2024 tidak terdapat koreksi nilai persediaan.

#### E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

*Selisih Revaluasi Aset Rp. 0,-.* Revaluasi Aset merupakan penilaian kembali terhadap harga wajar asset yang dimiliki oleh satuan kerja di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah. Selisih

Revaluasi Aset untuk tahun 2023 dan 2024 adalah masing-masing Rp. 0,-

#### E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (Rp. 83.645.220,-)* Nilai Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah sebesar (Rp. 83.645.220,-) dan Rp. 868.653,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan disebabkan oleh revaluasi nilai.

#### E.4.5. Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-lain Rp. 0,-* Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

#### E.5. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar Entitas Rp. 13.153.269.424,-* Nilai Transaksi Antar Entitas Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 30 Desember 2023 Adalah masing-masing Sebesar Rp. 13.153.269.424,- dan Rp. 14.027.813.301,-

##### E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/ Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain/Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp. 13,192,690,212,- sedangkan DDEL sebesar Rp. 39,420,788,-

### E.5.2. Transfer Masuk/Transfer keluar

*Transfer* Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal  
*Masuk/Keluar* KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk  
*Rp. 0,-* sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-

### E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung

*Pengesahan Hibah* Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas  
*Langsung* pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang  
*Rp. 0,-* maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-

### E.6. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir* Nilai Ekuitas pada akhir Desember 2024 dan Desember 2023  
*Rp.* adalah masing-masing sebesar Rp. 370.856.664.144,- dan Rp.  
*370.856.664.144,-* 372,442,670,053,-

## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### F.1. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

### F.2. Pengungkapan Lain-Lain

Sampai dengan tersusunnya laporan keuangan ini sudah tidak terdapat lagi to do list aplikasi SAKTI untuk periode Tahun 2024.

### F.3. Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 Nomor 17b/LHP/XIV/05/2025 Tanggal 19 Mei 2025 terdapat temuan atas pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak valid dan pembayaran perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 7.824.868 (Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah). Atas temuan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar nilai temuan tersebut sebagaimana tertuang dalam bukti penerimaan negara dengan nomor NTPN 51FoD2G502VCNGKE tanggal 26 Mei 2025.

### F.3. Pengungkapan Lainnya

#### F.3.1. Pengungkapan Terkait Penyusunan Laporan Keuangan

Sumber Daya Manusia (SDM) penyusun Laporan Keuangan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah belum sepenuhnya memahami mengenai proses bisnis akuntansi pemerintah berbasis akrual dikarenakan terbatasnya SDM dengan latar belakang pendidikan Akuntansi yang mencukupi;

#### F.3.2. Langkah Strategis Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait BMN dan Penyusunan Laporan Keuangan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Agar dapat dilaksanakan kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis bagi Penyusun Laporan Keuangan modul GLP Sakti sehingga pengetahuan bertambah;
2. Agar dapat dilaksanakan kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis bagi para operator BMN Sakti sehingga pengetahuannya bertambah;
3. Menghimbau kepada seluruh penanggung jawab unit akuntansi pengguna barang untuk memberikan perhatian terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN;

#### F.3.3. Informasi Rekening Pemerintah

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah memiliki rekening atas nama BPG 026 BALAI DIKLAT KUMHAM JATENG pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Pattimura dengan Nomor Rekening : 0083-01-002516-30-0, saldo per 31 Desember 2024 adalah Rp. 0,-.

# LAMPIRAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : ( 409157 ) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN  
HAM JAWA TENGAH

Tgl Data : 22/05/25 6:25 PM

Tgl Cetak : 25/07/25 9:18 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	372,416,979,638	368,978,247,825	3,438,731,813	0.93
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14,737,348,046)	(10,589,950,141)	(4,147,397,905)	39.16
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(8,137,328)	868,653	(9,005,981)	(1,036.78)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(8,165,220)	868,653	(9,033,873)	(1,039.99)
LAIN-LAIN	27,892	0	27,892	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	13,153,269,424	14,027,813,301	(874,543,877)	(6.23)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,592,215,950)	3,438,731,813	(5,030,947,763)	(146.3)
EKUITAS AKHIR	370,824,763,688	372,416,979,638	(1,592,215,950)	(0.43)

Keterangan :

FINAL

Semarang, 25 Juli 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kepala Badiklat

RINTO GUNAWAN SITORUS  
NIP 198208292008011001

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH**  
**SATUAN KERJA : ( 409157 ) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM

Tgl Cetak : 25/07/25 9:19 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Piutang Bukan Pajak	0	5,578,446	(5,578,446)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(27,892)	27,892	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	5,550,554	(5,550,554)	(100.00)
Persediaan	10,334,380	9,614,355	720,025	7.49
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>10,334,380</b>	<b>15,164,909</b>	<b>(4,830,529)</b>	<b>(31.85)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	323,737,178,000	323,737,178,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	8,042,520,811	7,580,845,811	461,675,000	6.09
Gedung dan Bangunan	48,900,340,295	48,552,943,295	347,397,000	0.72
Aset Tetap Lainnya	7,983,150	7,983,150	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(9,864,036,242)	(7,494,267,362)	(2,369,768,880)	31.62
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>370,823,986,014</b>	<b>372,384,682,894</b>	<b>(1,560,696,880)</b>	<b>(0.42)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	140,750,000	140,750,000	0	0.00
Aset Lain-lain	39,105,126	39,105,126	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(157,511,376)	(137,032,876)	(20,478,500)	14.94
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>22,343,750</b>	<b>42,822,250</b>	<b>(20,478,500)</b>	<b>(47.82)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>370,856,664,144</b>	<b>372,442,670,053</b>	<b>(1,586,005,909)</b>	<b>(0.43)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	31,900,456	25,690,415	6,210,041	24.17
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>31,900,456</b>	<b>25,690,415</b>	<b>6,210,041</b>	<b>24.17</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>31,900,456</b>	<b>25,690,415</b>	<b>6,210,041</b>	<b>24.17</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	370,824,763,688	372,416,979,638	(1,592,215,950)	(0.43)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>370,824,763,688</b>	<b>372,416,979,638</b>	<b>(1,592,215,950)</b>	<b>(0.43)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>370,824,763,688</b>	<b>372,416,979,638</b>	<b>(1,592,215,950)</b>	<b>(0.43)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>370,856,664,144</b>	<b>372,442,670,053</b>	<b>(1,586,005,909)</b>	<b>(0.43)</b>

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

**UNIT ORGANISASI : ( 12 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**WILAYAH/PROVINSI : ( 0300 ) JAWA TENGAH**

**SATUAN KERJA : ( 409157 ) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN  
HAM JAWA TENGAH**

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM

Tgl Cetak : 25/07/25 9:19 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

Keterangan :

FINAL

Semarang, 25 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Badiklat

RINTO GUNAWAN SITORUS

NIP 19820829200801 1001

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**ESELON I** : ( 12 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0300 ) JAWA TENGAH  
**SATUAN KERJA** : ( 409157 ) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM

Tgl Cetak : 25/07/25 9:18 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,538,635,576	1,430,988,361	107,647,215	7.523
Beban Persediaan	78,122,185	63,068,805	15,053,380	23.868
Beban Barang dan Jasa	6,321,435,843	3,988,366,673	2,333,069,170	58.497
Beban Pemeliharaan	803,514,305	477,533,973	325,980,332	68.263
Beban Perjalanan Dinas	3,647,400,319	2,237,219,048	1,410,181,271	63.033
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
 (DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**ESELON I** : ( 12 ) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0300 ) JAWA TENGAH  
**SATUAN KERJA** : ( 409157 ) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM  
 Tgl Cetak : 25/07/25 9:18 AM  
 Halaman : 2  
 lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,382,082,160	2,392,745,389	(10,663,229)	(0.446)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	27,892	(27,892)	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>14,771,190,388</b>	<b>10,589,950,141</b>	<b>4,181,240,247</b>	<b>39.483</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(14,771,190,388)</b>	<b>(10,589,950,141)</b>	<b>(4,181,240,247)</b>	<b>39.483</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	33,842,342	0	33,842,342	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	33,842,342	0	33,842,342	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>33,842,342</b>	<b>0</b>	<b>33,842,342</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(14,737,348,046)</b>	<b>(10,589,950,141)</b>	<b>(4,147,397,905)</b>	<b>39.164</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(14,737,348,046)</b>	<b>(10,589,950,141)</b>	<b>(4,147,397,905)</b>	<b>39.164</b>

---

Keterangan :

FINAL

Semarang, 25 Juli 2025  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kepala Badiklat

RINTO GUNAWAN SITORUS  
NIP 198208292008011001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013  
**ESELON I** : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 12  
**SATUAN KERJA** : BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH 409157

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM

Tgl Cetak : 25/07/25 9:17 AM

Halaman : 2

lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>13,366,666,000</b>	<b>13,192,690,212</b>	<b>(173,975,788)</b>	<b>98.70</b>	<b>14,287,752,000</b>	<b>13,991,995,026</b>	<b>(295,756,974)</b>	<b>97.93</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :

FINAL

Semarang, 25 Juli 2025  
 Penanggung Jawab UAKPA  
 Kepala Badiklat

RINTO GUNAWAN SITORUS  
 NIP 198208292008011001



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN 2024**

**Nomor : 17b/LHP/XIV/05/2025**

**Tanggal : 19 Mei 2025**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210  
Telp. (021) 25549000 Fax. (021) 5738725**

**Tabel 16 Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Valid dan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan**

No.	Satker/UPT	Nilai pertanggungjawaban belanja tidak valid (Rp)	Nilai pembayaran belanja tidak sesuai ketentuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
a	b	c	d	e=c+d	f
<b>A. Kemenum</b>					
1.	Kanwil Kemenkumham Maluku Utara	49.985.573,00	2.929.644,00	52.915.217,00	Bukti hotel dan taksi valid senyatanya, klaim biaya asuransi, <i>markup</i> bukti hotel dan klaim biaya cicilan kartu kredit pribadi.
2.	Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan	31.876.179,00	6.022.881,00	37.899.060,00	Bukti hotel, taksi dan tiket pesawat tidak valid; biaya asuransi dan biaya pemilihan kursi diklaim; biaya hotel diatas SBM, <i>markup</i> harga hotel; biaya cicilan kartu kredit pribadi diklaim; tiket pesawat diluar tanggal penugasan dan uang harian melebihi tarif SBM
3.	Kanwil Kemenkumham Kep. Riau	0,00	28.559.680,00	28.559.680,00	Bukti pembayaran penginapan tidak valid
4.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	0,00	7.824.868,00	7.824.868,00	Uang harian melebihi tarif SBM; pembayaran biaya penginapan, tiket, dan transport tidak sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas
<b>Subtotal A</b>		<b>81.861.752,00</b>	<b>45.337.073,00</b>	<b>127.198.825,00</b>	
<b>B. Kemen-HAM</b>					
1.	Ditjen HAM	0,00	71.940.941,00	71.940.941,00	Uang harian tidak sesuai dengan klasifikasi golongan pelaksana perjalanan dinas dan pembayaran biaya penginapan di luar komponen pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri
<b>Subtotal B</b>		<b>0,00</b>	<b>71.940.941,00</b>	<b>71.940.941,00</b>	
<b>C. Kemenimipias</b>					
1.	Ditjen Imigrasi	0,00	92.213.710,60	92.213.710,60	Uang harian tidak sesuai ketentuan
2.	Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung	79.225.088,00	83.740.354,00	162.965.442,00	Bukti hotel, taksi dan tiket pesawat tidak valid; <i>markup</i> bukti hotel; dan uang harian melebihi tarif SBM
3.	Lapas Kelas IIA Balikpapan	0,00	4.480.000,00	4.480.000,00	Uang harian paket <i>meeting</i> melebihi tarif SBM
4.	Lapas Kelas IIA Ternate	0,00	4.169.400,00	4.169.400,00	Uang harian melebihi tarif SBM dan biaya asuransi diklaim
5.	Kanim Kelas I TPI Ternate	7.394.000,00	8.378.806,00	15.772.806,00	Bukti hotel tidak valid biaya asuransi diklaim; <i>markup</i> bukti hotel; biaya hotel melebihi tarif SBM, dan uang harian dan biaya taksi diklaim ganda
<b>Subtotal C</b>		<b>86.619.088,00</b>	<b>192.982.270,60</b>	<b>279.601.358,60</b>	
<b>Jumlah total A+B+C</b>		<b>168.480.840,00</b>	<b>310.260.284,60</b>	<b>478.741.124,60</b>	

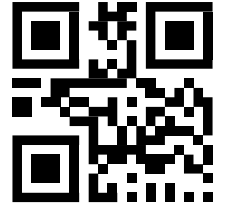
Sumber: Olah data

## Rincian Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Valid dan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan

No.	Satker/UPT	Nilai Tidak valid (Rp)	Nilai Tidak sesuai ketentuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Nilai pengembalian (Rp)	Nilai sisa (Rp)	Keterangan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=c+d</i>	<i>f</i>	<i>g=e-f</i>	<i>h</i>
<b>A</b>	<b>Kementrian Hukum</b>						
1	Kanwil Maluku Utara	49.985.573,00	2.929.644,00	52.915.217,00	52.915.217,00	-	Lunas
2	Kanwil Kalimantan Selatan	31.876.179,00	6.022.881,00	37.899.060,00	37.899.060,00	-	Lunas
3	Kanwil Kepulauan Riau	-	28.559.680,00	28.559.680,00	28.559.680,00	-	Lunas
4	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	-	7.824.868,00	7.824.868,00	-	7.824.868,00	Lampiran 16
	<b>Jumlah A</b>	<b>81.861.752,00</b>	<b>45.337.073,00</b>	<b>127.198.825,00</b>	<b>119.373.957,00</b>	<b>7.824.868,00</b>	
<b>B</b>	<b>Kementrian Hak Asasi Manusia</b>						
1	Ditjen HAM	-	71.940.941,00	71.940.941,00	65.266.404,60	6.674.536,40	Lampiran 16
	<b>Jumlah B</b>	<b>-</b>	<b>71.940.941,00</b>	<b>71.940.941,00</b>	<b>65.266.404,60</b>	<b>6.674.536,40</b>	
<b>C</b>	<b>Kementrian Imigrasi dan Pemasarakatan</b>						
1	Ditjen Imigrasi		92.213.710,60	92.213.710,60	27.018.329,00	65.195.381,60	Lampiran 16
2	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	79.225.088,00	83.740.354,00	162.965.442,00	162.965.442,00	-	Lunas
3	Lapas Kelas IIA Balikpapan	-	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	-	Lunas
4	Lapas Kelas IIA Ternate	-	4.169.400,00	4.169.400,00	3.169.400,00	1.000.000,00	Lampiran 16
5	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	7.394.000,00	8.378.806,00	15.772.806,00	-	15.772.806,00	Lampiran 16
	<b>Jumlah C</b>	<b>86.619.088,00</b>	<b>192.982.270,60</b>	<b>279.601.358,60</b>	<b>197.633.171,00</b>	<b>81.968.187,60</b>	
	<b>Total (A+B+C)</b>	<b>168.480.840,00</b>	<b>310.260.284,60</b>	<b>478.741.124,60</b>	<b>382.273.532,60</b>	<b>96.467.592,00</b>	

## Rincian Belanja Perjalanan Dinas Tidak Valid dan Tidak Sesuai Ketentuan yang Belum Disetor ke Kas Negara

No	Nama	Nilai yang Dibayarkan	Nilai Seharusnya Dibayarkan	Kelebihan Pembayaran	Tidak Valid	Tidak Sesuai Ketentuan	Keterangan
1	2	3	4	5 = 3- 4	6	7	9
<b>A</b>	<b>Balai Diklat Kemenkumham Jawa Tengah</b>						
1	RGS	6.955.998,00	6.101.999,00	853.999,00	-	853.999,00	Penginapan lebih 1 malam
2	ADF	5.198.400,00	5.066.400,00	132.000,00	-	132.000,00	Selisih tarif penginapan
3	SGM	4.112.500,00	3.834.940,00	277.560,00	-	277.560,00	Selisih tarif penginapan dan
4	JF	3.957.500,00	3.834.940,00	122.560,00	-	122.560,00	Selisih transport
5	IP	4.937.304,00	4.432.284,00	505.020,00	-	505.020,00	Selisih transport tol
6	BIS	7.445.804,00	7.157.214,00	288.590,00	-	288.590,00	Selisih transport isi bensin dan tol tgl 12
7	LJPH	6.981.500,00	6.851.500,00	130.000,00	-	130.000,00	Selisih taksi
8	SGM	7.264.200,00	7.222.230,00	41.970,00	-	41.970,00	Selisih tarif hotel
9	RGS	6.057.700,00	4.039.700,00	2.018.000,00	-	2.018.000,00	Selisih UH dan hotel (hotel tgl 10, tdk ada bukti berangkat)
10	ADF	6.778.820,00	6.634.630,00	144.190,00	-	144.190,00	Selisih transport
11	EW	6.836.320,00	6.745.130,00	91.190,00	-	91.190,00	Selisih transport
12	AA	5.233.843,00	4.598.804,00	635.039,00	-	635.039,00	Selisih tol dan BBM
13	RGS	3.800.000,00	3.600.000,00	200.000,00	-	200.000,00	Selisih tarif UH
14	ADF	4.544.200,00	4.344.200,00	200.000,00	-	200.000,00	Selisih tarif UH
15	EW	3.545.000,00	3.345.000,00	200.000,00	-	200.000,00	Selisih tarif UH
16	AA	7.159.654,00	6.221.444,00	938.210,00	-	938.210,00	Selisih tarif UH, tol, BBM
17	ADF	6.650.330,00	6.450.310,00	200.020,00	-	200.020,00	Selisih tarif UH, transport
18	EYN	6.762.330,00	6.562.310,00	200.020,00	-	200.020,00	Selisih tarif UH, transport
19	RGS	5.613.930,00	4.967.430,00	646.500,00	-	646.500,00	Tiket PKY-CGK dan transport darat
	<b>Jumlah A</b>	<b>109.835.333,00</b>	<b>102.010.465,00</b>	<b>7.824.868,00</b>	-	<b>7.824.868,00</b>	
<b>B</b>	<b>Ditjen HAM</b>						
1	MRK	27.744.672,00	25.057.688,00	2.686.984,00	-	2.686.984,00	uang harian yang tidak sesuai dengan klasifikasi golongan pelaksana perjalanan dinas luar negeri
2	GRNP	10.877.932,80	9.577.364,40	1.300.568,40	-	1.300.568,40	uang harian yang tidak sesuai dengan klasifikasi golongan pelaksana perjalanan dinas luar negeri
3	MEAV	27.744.672,00	25.057.688,00	2.686.984,00	-	2.686.984,00	uang harian yang tidak sesuai dengan klasifikasi golongan pelaksana perjalanan dinas luar negeri
	<b>Jumlah B</b>	<b>66.367.276,80</b>	<b>59.692.740,40</b>	<b>6.674.536,40</b>	-	<b>6.674.536,40</b>	



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250526270094  
Tanggal Billing : 26-05-2025 13:51:41  
Tanggal Kedaluwarsa : 02-06-2025 13:51:41  
Tanggal Bayar : **26-05-2025 14:40:06**  
Bank/Pos/Fintech Bayar : POS INDONESIA  
Channel Bayar : **Teller**  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran  
Kementerian/Lembaga : **135 - KEMENTERIAN HUKUM**  
Unit Eselon I : **13 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**  
Satuan Kerja : **693164 - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH**  
Total Disetor : 7.824.868 (IDR)  
Terbilang : *Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
NTB : **916140144006**  
NTPN : **51F0D2G502VCNGKE**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425912-Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 7.824.868 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan TA 2024